



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RIMA PURNAMAYANI  
NIK : 1671045306760006  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN  
HIDROLOGI PERTANIAN  
Jabatan : KEPALA BALAI  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 5 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERI WIBOWO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **922108**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>527.045.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/145 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 282.045.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>176.500.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>18.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>405.000.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>302.120.090</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.428.665.090</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.428.665.090</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD NUR IMANSYAH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 657588

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	425.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m <sup>2</sup> /85 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	5.000.000
1. LAINNYA, SEPEDA LISTRIK SEPEDA LISTRIK Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	2.670.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	500.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	433.170.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	530.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-96.830.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SULISTYAWATI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **141944**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>950.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m <sup>2</sup> /36 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>440.684.091</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.434.184.091</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>21.236.815</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.412.947.276</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DIAN ANDRIANI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **147874**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 995.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m<sup>2</sup>/40 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 68.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, DATSUN GO PANCA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 14.250.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.406.065

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.084.656.065

**III. HUTANG** Rp. 264.637.064

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 820.019.001



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDRIANUS HERLIYANTO ADI WIBOWO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **1038309**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.050.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m <sup>2</sup> /50 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m <sup>2</sup> /30 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>92.500.000</b>
1. MOBIL, NISAN MARCH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>62.527.432</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.205.027.432</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>587.499.730</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>617.527.702</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.